

**BUDAYA POLITIK LOKAL DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI DESA
SUMBER SARI KECAMATAN SEBULU DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014.**

Adi Sucipto

FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara
Jl. Gunung Kombeng No. 27, Tenggarong, Kaltim
e_mail: adi.sucipto1981@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the type of political culture, the type of political participation, political and cultural influences on the level of political participation of the people in the village of Sumber Sari subdistrict Sebulu. This study focused on the level of community participation in the village of Sumber Sari subdistrict Sebulu in the General Election 2014 Legislative method used in this research is descriptive quantitative method that factually describes the actual situation and the variables studied are descriptive with quantitative approach. Techniques used for data collection by using the method of Observation, Research Library, and the spaciousness to jump directly distributing questionnaires to a sample of the community. For seats the information in accordance with its function, the use of frequency distribution data analysis are then processed again by using cross-tabulation (crosstab), and chi-square.

Given the circumstances and conditions of the people in the village of Sumber Sari after the research is done, and after analyzed the discovery proves that there isn't a significant relationship between local political culture to the level of political participation of the community in the implementation of the General Election 2014 General Legislative, see the society's political culture largely classified have a political culture servant (subject political culture), which reached 64.95%, the remaining approximately 19.59% belong to a civilized society political participants (participant political culture), and the remaining 15.46% is classified as a civilized society parochial politics (parochial political culture). People who belong to the civilized society of political participants may be affected other people, while the people who belong to the community even more parochial political culture is autonomous and not mobilized others.

Key words: Culture Local Politics, and Society Political Participation.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Di dalam negara yang demokratis Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan suatu negara. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, namun format demokrasi yang ideal baru nampak pada penyelenggaraan pemilu 2004 lalu yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden, yang berjalan relatif cukup lancar dan aman.

Untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi, setiap warga negara dituntut untuk aktif terlibat, mereka tidak hanya menerima dan memenuhi tuntutan orang lain tetapi dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, sehingga sistem pemerintahan yang demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya.

Keadaan politik di desa Sumber Sari masih jauh seperti yang diharapkan. Banyak masyarakat enggan sebagai pemilih dalam pemilu lebih disebabkan pada ketidakpercayaan mereka pada rezim pemerintahan yang berkuasa. Kekecewaan mereka cenderung pada proses politik yang berlangsung karena cenderung tidak membawa dampak yang signifikan yang langsung dirasakan masyarakat dan jikapun ada membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, sebagian masyarakat menjadi enggan memberikan suaranya pada Pemilu, dan pada akhirnya kecenderungan ini membawa efek kepada sistem politik yang dilaksanakan.

Dalam bentuk nyata pemerintah masih belum mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian masyarakat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara dan infrastruktur umum yang belum memadai sehingga belum bisa dimanfaatkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada akhirnya pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintahan yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik, bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan, dengan demikian masalah-masalah mengenai perpolitikan yang berhubungan dengan kepemiluan sangat kompleks sehingga masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih tentang masalah politik.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu memang menjadi indikator legitimasi pemerintahan yang terbentuk, tidak jarang pemerintah berusaha mendorong masyarakatnya untuk memberikan

suaranya ketika Pemilu berlangsung. Namun, tidak sedikit pula individu yang enggan ikut serta dalam Pemilu yang dilaksanakan karena berbagai faktor. Mereka cenderung individu yang tidak memilih (non voter) ketika Pemilu dilaksanakan, walaupun sebenarnya mereka juga memiliki keinginan untuk terlibat dalam proses politik seperti Pemilu. Namun, jika pada hari pemilihan ini bertepatan dengan kegiatan mereka beraktivitas, umumnya masyarakat ini cenderung memilih untuk menjalankan aktivitasnya daripada harus hadir dalam Pemilihan umum untuk memberikan suaranya. Hal ini disebabkan karena secara ekonomi masyarakat di desa Sumber Sari sebagian besar bermatapencaharian sebagai wiraswasta, karyawan perusahaan swasta, dan petani.

Dilihat dari berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur kalimantan timur tahun 2013 di tingkat kecamatan, angka Golput dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2013, berdasarkan hasil perhitungan, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di desa Sumber Sari mencapai 1.854 jiwa dari total pemilih tetap 3.751 jiwa.

Melihat uraian kenyataan dilapangan, dalam hal ini penulis mencoba melakukan penelitian lebih dalam tentang seberapa besar pengaruhnya budaya politik lokal dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, dalam penelitian ini peneliti terfokus di desa Sumber Sari kecamatan Sebulu agar mendapat gambaran yang lebih spesifik tentang budaya dan tingkat partisipasinya.

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif ini, dengan Judul : “Budaya Politik Lokal dan Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014”.

II. KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Budaya Politik

Lahirnya kebudayaan itu sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat. Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama.

Almond dan Verba (1990:13) mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. **Budaya Politik parokial** (*parochial political culture*) yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik masyarakat dapat dikatakan parokial apabila frekuensi orientasi individu tersebut terhadap dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak **memiliki perhatian sama sekali terhadap dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini** umumnya terdapat pada wilayah atau lingkup yang kecil, sempit misalnya yang bersifat provincial. Karena wilayah yang terbatas seringkali pelaku politik memainkan peranannya seiring dengan diferensiasi, maka tidak terdapat peranan politik yang bersikap khas dan berdiri sendiri.

Ciri-ciri Masyarakat (orang) dengan budaya politik Parokial, antara lain :

- Apatis;
- Pengetahuan politik rendah;
- kesadaran dalam berpolitik rendah;
- Tidak peduli dan menarik diri dari kehidupan politik.

- b. **Budaya Politik kaula** (*subyek political culture*) yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif, anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama pada aspek outputnya. Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan input politik boleh dikatakan nol. Posisi sebagai kaula merupakan posisi yang pasif dan lemah. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem dan oleh karena itu menyerah saja pada kepada segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan.

Ciri-ciri Masyarakat (Orang) dengan budaya politik kaula, antara lain :

- Memiliki pengetahuan dalam bidang politik yang cukup;
- Partisipasi politik minim;
- Kesadaran dalam berpolitik rendah.

- c. **Budaya Politik partisipan** (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Masyarakat dalam budaya ini memiliki sikap yang kritis untuk memberi penilaian terhadap sistem politik dan hampir pada semua aspek kekuasaan.

Ciri-ciri Masyarakat (Orang) dengan budaya politik partisipan, antara lain :

- Pengetahuan tentang politik tinggi;

- kesadaran dalam berpolitik tinggi;
- Partisipasi dalam berpolitik aktif;
- Kontrol Politik aktif.

2.2. Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam dinamisasi politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting terutama dalam hubungannya dengan praktik politik di sebuah negara. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih para wakil rakyat secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan lain-lain. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 1998:1-2 dalam Andi Faisal, 2012:119).

Dalam pengertian sederhana, partisipasi politik di sini merujuk pada segala aktivitas masyarakat yang dirancang untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pemerintah (Huntington, 1975:33). Dalam pengertian lain, menurut Ragamaran (2001:135), partisipasi politik dipahami sebagai keterlibatan individu pada berbagai tingkatan dalam suatu sistem politik. Lebih jauh, partisipasi politik yang dimaksudkan adalah kondisi dimana masyarakat berada dalam keadaan pasif ataupun aktif, sendiri atau kelompok, mempengaruhi suatu agenda yang dibuat pemerintah dan berdampak pada kehidupan masyarakat secara langsung. Banyak variabel yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Diantara variabel yang mempengaruhi lahirnya partisipasi politik tersebut adalah faktor ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, faktor budaya politik masyarakat serta faktor lingkungan sekitarnya. Tidak terbantahkan lagi bahwa kecenderungan pemberian suara dalam Pemilu (*voting*) adalah ukuran paling sederhana (rendah) dari sebuah bentuk partisipasi politik (Huntington & Nelson, 1976 dalam Asrinaldi, 2012:89).

Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, dilihat dari kegiatannya, tingkatannya, partisipasi politiknya dan tinggi rendahnya partisipasi politik, yakni (Sastroatmodjo, 1995: 8-10):

- Dilihat dari kegiatannya, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Partisipasi aktif dapat dilakukan melalui pengajuan alternatif kebijakan umum, mengajukan petisi, membayar pajak, dan sebagainya. Sementara partisipasi politik pasif ditunjukkan melalui kegiatan yang mencerminkan ketaatan dan penerimaan atas hal-hal yang menjadi keputusan pemerintah. Partisipasi aktif berorientasi pada segi masukan dan keluaran dari suatu sistem politik, sementara orientasi partisipasi pasif hanya apa aspek keluaran dari sistem politik.
- Dilihat dari tingkatannya dapat dibedakan menjadi apatis, spektator dan gladiator. Apatis artinya tidak menaruh perhatian sama sekali pada kegiatan politik dan bersikap masa

bodoh. Spektator berarti bahwa orang yang bersangkutan setidaknya-tidaknya ikut menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gladiator adalah tingkatan partisipasi politik sampai pada keikutsertaan secara aktif dalam proses politik. Ada yang membagi partisipan politik menjadi enam lapisan yakni : pemimpin politik, aktivis politik, komunikator politik, warga negara marginal dan orang yang terisolasi.

- c) Partisipasi politik dapat pula digolongkan sesuai dengan jumlah pelaku yang terlibat di dalamnya. Atas dasar itu, partisipasi politik dapat digolongkan menjadi partisipasi individual dan partisipasi kolektif.
- d) Dilihat dari tinggi rendahnya partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif, partisipasi yang pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi yang tidak aktif. Aktif jika masyarakat memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi dan percaya pada sistem yang ada. Pasif tertekan apabila kesadaran politik ada dan kepercayaan terhadap sistem politik sangat rendah. Militan radikal apabila kesadaran politik masyarakat tinggi, sedangkan kepercayaan terhadap sistem politik sangat rendah. Tidak aktif, jika kesadaran politik masyarakat sangat rendah, tapi kepercayaan terhadap sistem politik sangat-sangat tinggi.

Partisipasi politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas rakyat untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut.

2.3. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran secara konkrit dalam penulisan dibawah ini dikemukakan beberapa konsep operasional dari masing-masing variabel yang diamati dan mencakup indikator-indikator yang dipakai untuk suatu variabel dalam penelitian, maka berikut ini penulis sajikan indikator-indikator.

- Variabel x (budaya politik)
 - a. Parokial:
 - Apatis;
 - Pengetahuan politik rendah;
 - kesadaran dalam berpolitik rendah;
 - b. Subyektif:
 - Memiliki pengetahuan dalam bidang politik yang cukup;
 - Partisipasi politik minim;
 - Kesadaran dalam berpolitik rendah.
 - c. Partisipan
 - Pengetahuan tentang politik tinggi;
 - kesadaran dalam berpolitik tinggi;
 - Partisipasi dalam berpolitik aktif;
- Variabel y (partisipasi politik) :

- a. Sukarela (Otonom)
- b. Desakan Orang Lain (Dimobilisasi)

III. METODOLOGI

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis data dan analisisnya penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang menggambarkan secara faktual keadaan yang sebenarnya dan variabel yang diteliti secara deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

3.2. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Mengingat besarnya jumlah responden dan beragamnya strata atau tingkatan pendidikan, pangkat dan golongan serta perbedaan latar belakang pemahaman responden yang akan memberikan respon jawaban pada pertanyaan-pertanyaan penelitian nan tinya, untuk mempermudah proses tersebut maka berikut ini akan dipaparkan teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan jenis instrumen penelitiannya, yaitu sebagai berikut.

1. Metode observasi atau pengamatan (*observation research*), yaitu melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian. Metode ini akan digunakan dalam penelitian awal atau penjajakan untuk mengetahui keadaan awal di lapangan atau wilayah penelitian, yaitu Desa Sumber Sari.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari literatur dan buku-buku sebagai acuan dasar teori. Penelitian kepustakaan dalam arti peneliti mengumpulkan data-data dengan mencari kelengkapan dasar teori, baik di Perpustakaan Umum Provinsi maupun di Perpustakaan Kampus Universitas Kutai Kartanegara.
3. *Field Work Research*, yaitu penelitian dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan dengan menggunakan teknik:
 - a. Dokumentasi atau pemberkasan (*documen research*), metode ini akan digunakan untuk mengetahui data fisik penelitian, seperti jumlah responden yang memiliki hak suaranya dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.
 - b. Kuisisioner atau angket (*quesioner*), yaitu dengan menyediakan data-data pertanyaan untuk diisi oleh responden sesuai dengan data yang diperlukan peneliti. Hal ini dimaksudkan untuk melihat respon pemilih dalam menyalurkan suara politiknya, dan membandingkan

pilihan-pilihan politik berdasarkan strata, tingkat pendidikan, suku, dan jenis kelamin responden.

3.3. Teknik Analisis Data

Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kuantitatif yaitu sebuah teknik yang mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah dikumpulkan. Teknik deskriptif-kuantitatif yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah teknik distribusi frekuensi yang menggambarkan nilai prosentase. Hasil pengolahan tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis cross tabulation yang merupakan metode analisis berbentuk tabel, dimana menampilkan tabulasi silang atau tabel kontingensi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Selanjutnya dilakukan juga uji Chi Square untuk menentukan signifikansi hubungan yang ditunjukkan dalam analisis cross tabulation.

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil dan pembahasan ini terbagi atas: deskripsi wilayah penelitian, budaya politik lokal di desa Sumber Sari, tipe partisipasi politik masyarakat di desa Sumber Sari kecamatan sebulu, dan pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik masyarakat di desa Sumber Sari kecamatan Sebulu.

4.1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Sumber Sari merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan Sebulu kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah total Penduduk yang ada di desa Sumber Sari yaitu berjumlah 5.190 orang yang terdiri dari 2.751 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 2.439 orang berjenis kelamin perempuan dari jumlah tersebut masyarakat yang memiliki hak pilihnya di Desa Sumber Sari dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 berjumlah 3.692 orang Pemilih, yang terdiri dari 1.943 orang pemilih perempuan dan 1.749 orang pemilih laki-laki.

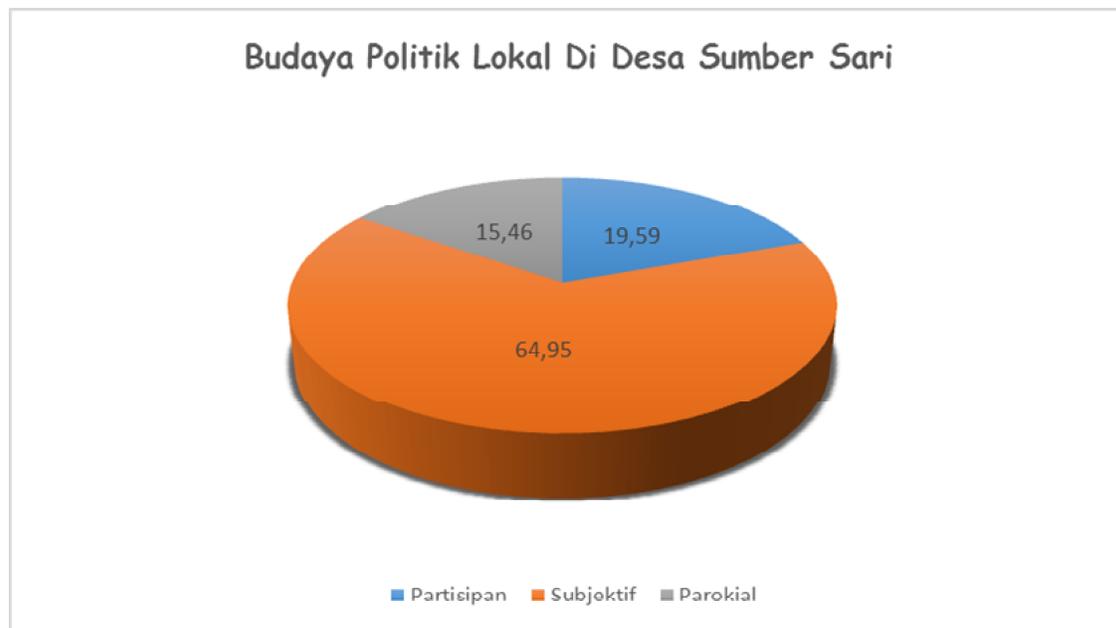
Berdasarkan Perda No 707/SK-Bup/HK/2011 tentang penetapan batas dan peta wilayah, dilihat dari letak geografisnya sebelah utara berbatasan dengan Desa Mekar Jaya (Kec. Sebulu),

Desa Sabin Tulung (Kec.Muara Kaman), sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sebulu Ulu (Kec. Sebulu) dan Desa Sebulu Modern (Kec. Sebulu), sebelah timur berbatasan dengan Desa Giri Agung (Kec. Sebulu), dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Manunggal Daya (Kec.Sebulu). Dilihat dari Luas wilayah menurut penggunaannya total luas wilayahnya adalah 3.157,00 Ha yang terdiri dari 245,00 Ha Luas Pemukiman, 225,00 Ha Luas Persawahan, 1.869,00 Ha Luas Perkebunan, 3,00 Ha Luas Kuburan, 780,00 Ha Luas Pekarangan, 1,00 Ha Luas Perkantoran, dan 34,00 Ha Luas Prasarana Umum Lainnya.

4.2. Budaya Politik Lokal di Desa Sumber Sari

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Sumber Sari kecamatan Sebulu, dapat diketahui bahwa budaya politik masyarakat di desa sumber sari dapat digolongkan sebagai berikut.

Gambar.4.1. Budaya Politik Lokal di Desa Sumber Sari



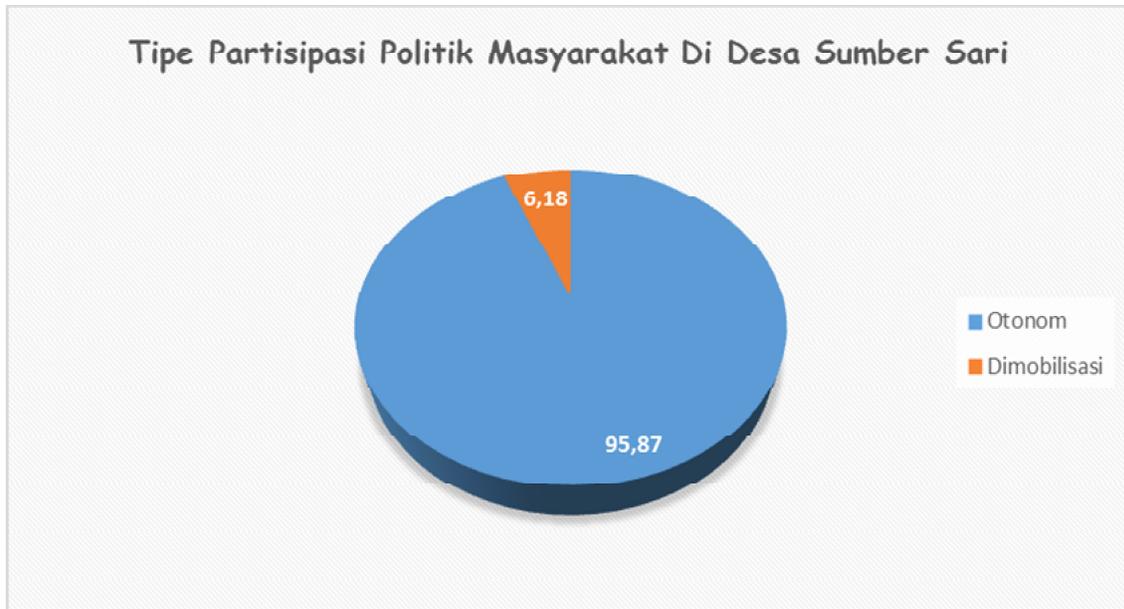
Sumber: Hasil Jawaban Responden, 2014.

Berdasarkan Gambar 4.2. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di desa Sumber Sari yaitu 64,95% tergolong masyarakat yang Subyektif, dimana masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Selebihnya yaitu 19,59% tergolong masyarakat yang Partisipan dimana masyarakatnya kesadaran politiknya sangat tinggi. Dan sisanya yaitu 15,46% masih tergolong masyarakat yang parokial, dimana tingkat partisipasi politiknya sangat rendah.

4.3. Tipe Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Sumber Sari

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Sumber Sari kecamatan Sebulu, dapat diketahui bahwa tipe partisipasi politik masyarakat di desa sumber sari dapat digolongkan sebagai berikut.

Gambar.4.2. Tipe Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Sumber Sari



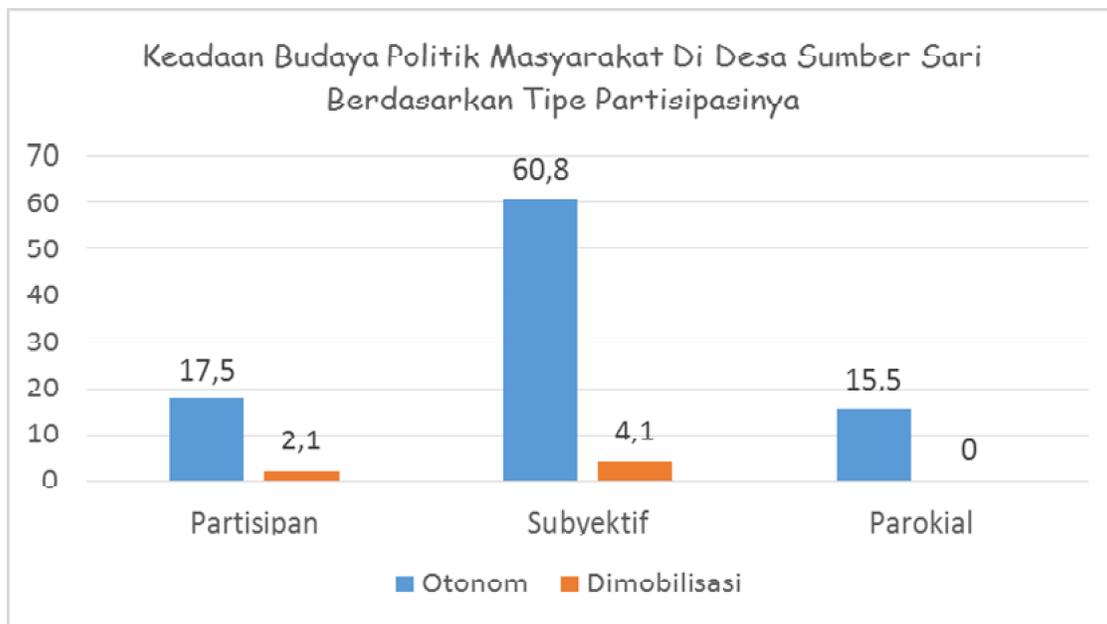
Sumber: Hasil Jawaban Responden, 2014.

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di desa Sumber Sari yaitu 95,87% cenderung otonom yaitu berdasarkan kesadaran diri dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilu. Sedangkan sisanya yaitu 6,18% cenderung dimobilisasi atau dipengaruhi orang lain dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilu.

4.4. Pengaruh Budaya Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Sumber Sari.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Sumber Sari kecamatan Sebulu dan setelah dilakukan dianalisa, dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik masyarakat, yaitu sebagai berikut.

Gambar 4.3. Keadaan Budaya Politik Masyarakat di Desa Sumber Sari Berdasarkan Tipe Partisipasinya.



Sumber: Hasil Jawaban Responden, 2014.

Berdasarkan Gambar 4.3 tentang hasil tabulasi silang budaya politik lokal dan partisipasi politik masyarakat memperoleh hasil yang berbudaya politik Partisipan yang tergolong otonom atau sesuai dengan kesadaran diri sendiri yaitu 17,5%, sedangkan masyarakat yang berbudaya politik Partisipan yang tergolong dimobilisasi atau dipengaruhi orang lain sebanyak 2,1%. Budaya politik Subyektif yang tergolong otonom sebesar 60,8% dan yang tergolong dimobilisasi yaitu 4,1%. Dan dalam budaya politik Parokial yang tergolong otonom yaitu 15,0% sedangkan yang dimobilisasi justru 0%.

Sebagai bagian dari analisis cross tabulation, dilakukan juga uji Chi Square untuk menentukan signifikansi hubungan yang ditunjukkan dalam analisis cross tabulation.

Tabel Frekuensi kemudian dapat dianalisa menggunakan persamaan chi-square guna mengetahui hubungan kedua variabel sebagai berikut:

$$\chi^2 = \left(\sum \frac{(F_u - F_e)^2}{F_e} \right)$$

Keterangan:

χ^2 : Nilai chi-kuadrat

fe: Frekuensi yang diharapkan

fo: Frekuensi yang diperoleh/diamati

Selanjutnya untuk mengetahui hubungan budaya politik dengan partisipasi politik masyarakat digunakan tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Tabel Hubungan Budaya Politik Dengan Partisipasi Politik Masyarakat

No.	Budaya Politik	Partisipasi Politik (Otonom/Dimobilisasi i)	Fo	Fe	Fo-Fe	(Fo-Fe) ²	$\frac{(Fo - Fe)^2}{Fe}$
1.	Partisipan	Otonom	17	17,82	-0,82	0,6724	0,037732884
		Dimobilisasi	2	1,17	0,83	0,6889	0,588803419
2.	Subyektif	Otonom	59	59,1	-0,1	0,01	0,000169205
		Dimobilisasi	4	3,89	0,11	0,0121	0,00311054
3.	Parokial	Otonom	15	14,07	0,93	0,8649	0,061471215
		Dimobilisasi	0	0,92	-0,92	0,8464	0,92
Total			97	96,97	0,03	3,0947	1,611287263

Sumber : Hasil Jawaban Responden,2014.

Untuk menjawab, bandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel pada derajat kebebasan atau degree of freedom (DF) tertentu dan taraf signifikansi tertentu. Apabila chi-square hitung > chi-square tabel, maka perbedaan bersifat signifikan, artinya Ho ditolak atau Ha diterima.

Kemudian untuk uji signifikansi dilakukan dengan X^2 tabel yaitu:

$$\begin{aligned} Df &= (r-1)(c-1) && \text{Ket : } r = \text{baris} \\ &= (2-1)(3-1) && c = \text{Kolom} \\ &= (2)(1) \\ &= (2) \end{aligned}$$

Taraf signifikansi yang digunakan adalah 90% maka batas kritis 0,1 pada $Df = 2$, nilai chi-square tabel sebesar = 4,605.

Karena $1,611 < 4,605$, maka perbedaan tidak signifikan, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara budaya politik lokal terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di desa Sumber Sari dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel (x) yaitu Budaya Politik Lokal dengan Partisipasi Politik Masyarakat (y), dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan melihat hasil distribusi frekuensi, melakukan analisis tabulasi silang (*cross tab*) dan *chi-square* yang kemudian untuk uji signifikansi dilakukan dengan X^2 tabel, maka setelah dilakukan penelitian dan analisa data, ditemukan bahwa :

1. Secara Umum, berdasarkan hasil distribusi frekuensi, melihat budaya politik masyarakat di desa Sumber Sari sebagian besar tergolong masyarakat yang memiliki budaya politik kaula (*subyek political culture*) melihat hasil data penelitian sesuai Gambar 4.1 yang mencapai 64,95%, selebihnya sekitar 19,59% tergolong masyarakat berbudaya politik partisipan (*participant political culture*), dan sisanya yaitu 15,46% tergolong masyarakat yang berbudaya politik parokial (*parochial political culture*).
2. Dari hasil analisis *cross tab* diperoleh hasil sesuai tabel 4.3 tentang hasil tabulasi silang budaya politik lokal dan partisipasi politik masyarakat, hasil yang diperoleh yaitu yang berbudaya politik Partisipan yang tergolong otonom atau sesuai dengan kesadaran diri sendiri sebesar 17,5%, sedangkan masyarakat yang berbudaya politik Partisipan yang tergolong dimobilisasi atau dipengaruhi orang lain sebanyak 2,1%. Budaya politik Subyektif yang tergolong otonom sebesar 60,8% dan yang tergolong dimobilisasi yaitu 4,1%. Dan masyarakat yang masuk ke dalam budaya politik Parokial yang tergolong otonom yaitu 15,0% sedangkan yang dimobilisasi justru 0%.
3. Dari hasil analisis *chi-square* setelah dilakukan perbandingan antara *chi-square* hitung dengan *chi-square* tabel pada derajat kebebasan atau degree of freedom (DF) adalah 2 dan taraf signifikansi yang digunakan adalah 90% maka batas kritis adalah 0,1 diperoleh hasil $1,611 < 4,605$ (*chi-square* hitung $<$ *chi-square* tabel), maka diperoleh perbedaan yang tidak signifikan, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara budaya

politik lokal terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di desa Sumber Sari dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014.

4. Melihat keadaan dan kondisi masyarakat di desa Sumber Sari setelah dilakukan penelitian, dan setelah dianalisis membuktikan bahwa tidak ditemukannya hubungan yang signifikan antara budaya politik lokal terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, dimana masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat yang berbudaya politik partisipan masih dapat dipengaruhi (dimobilisasi) orang lain, sedangkan masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat yang berbudaya politik parokial justru lebih bersifat otonom (berdasarkan kesadaran diri sen diri) dan tidak dimobilisasi orang lain.

5.2. Saran

Berdasarkan fakta yang penulis jumpai dilapangan usaha dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPPS dan Pihak Desa, dalam Pemilihan Umum Legislatif cukup dapat dikatakan sukses tetapi tidak 100%. Maka dari itu disarankan kepada :

1. Kepala Desa serta perangkat desa yang mendampingi masyarakat, dapat memberikan pemahaman lebih dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat.
2. Para Tokoh Masyarakat sekiranya dapat mengajak masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam Pemilihan, agar tingkat golput di daerah tersebut dapat diminimasir.
3. Panitia Pemilu sekiranya dapat berperan aktif memberikan pemahaman tentang tata-cara dalam pelaksanaan Pemilu kepada masyarakat, agar masyarakat tahu dan mengerti.

Sebagai warga negara yang taat dan baik seharusnya setiap masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA.

- Almond, Gabriel.A dan Sidney Verb.1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (terjemahan Sahat Simamora). Jakarta:Bumi Aksara.
- Asrinaldi. 2012. *Politik Masyarakat Miskin Kota*. Yogyakarta : Gava Media.
- Bakti, Andi Faisal dkk. 2012. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta : Churia Press.
- Huntington, S.P.1975.*Political Development*.Dlm fred I, Greens tein & Nelson W,Polsby (Eds). *Hand Book of Political science : macro political theory*, hal. 1-114. Addison Wesley Publishing Company.
- Ragmaran, R.2001.*Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995.*Prilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.